

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Bengkulu perspektif *siyasah tanfidziyah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Bengkulu telah dilaksanakan melalui berbagai program oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu. Program-program tersebut didasarkan pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan fasilitasi pelatihan keterampilan, penempatan tenaga kerja, serta kolaborasi dengan perusahaan swasta. Upaya ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah sebagai pelaksana kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program ketenagakerjaan telah memberikan dampak positif bagi pencari kerja dan dunia usaha, Program pelatihan kerja juga didukung oleh UPTD Pelatihan Kerja Kota Bengkulu yang memberikan berbagai jenis pelatihan keterampilan kepada masyarakat pencari kerja agar lebih siap memasuki dunia kerja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan secara maksimal. Kendala tersebut antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan kuota peserta pelatihan, penyebaran informasi yang belum merata kepada masyarakat, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan secara optimal, termasuk adanya

miskomunikasi antara UPTD Pelatihan Kerja dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu sejak tahun 2023.

2. Perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, terhadap pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam penanggulangan pengangguran telah mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah daerah menjalankan kewenangan eksekutif melalui kebijakan ketenagakerjaan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Program pelatihan dan penempatan kerja merupakan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah dampak pengangguran. Prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan telah diupayakan. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar program yang dijalankan lebih efektif, merata, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program penanggulangan pengangguran dengan menambah anggaran agar kuota pelatihan kerja bertambah, memperluas jangkauan program, dan memperbaiki penyebaran informasi kepada agar program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu dapat dirasakan secara merata, dan bermanfaat bagi pencari kerja sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam perspektif *Siyasaḥ tanfidziyah*
2. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak Perusahaan Swasta / Dunia Industri, untuk menyediakan tempat magang dan lapangan kerja untuk masyarakat para pencari kerja. Selain itu, Masyarakat dan pencari kerja juga diharapkan

aktif meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan program ketenagakerjaan. Kolaborasi ini mencerminkan tanggung jawab bersama untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Sesuai dengan prinsip *Siyasah tanfidziyah*, yaitu Amanah dan keadilan yang diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Ghazali, Abu Hamid 2021, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-USul*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi, Abu Al-Hasan 2005, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Yusuf 2020, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

Askar, Muhammad Afdhal 2022, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktik di Indonesia*, Makassar, CV Dotplus Publisher.

Budiardjo, Miriam 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Burhan, Firdaus 1988, *Bengkulu dalam Sejarah*, Jakarta, Balai Pustaka.

Djazuli, H. A. 2003, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta, Kencana.

Djamil, Fathurrahman 2016, *Desentralisasi dan Tata Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn 'Abd al-Halim 1998, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah*, Riyadh, Dar Al-Asimah.

Iqbal, Muhammad 2019, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, PT Nasya Expanding Management.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mahfud, Moh. Mahfud 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Mahfud, Moh. Mahfud 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mankiw, N. Gregory 2015, Principles of Economics, Stamford, Cengage Learning.
- Marbun, S. F. 2012, Hukum Administrasi Negara I, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Marzuki, Peter Mahmud 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman 1992, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Jakarta, UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian 2023, Fiqh Siyasah: Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam, Jakarta, Literasi Nusantara.
- Ridwan 2020, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Sugiyono 2016, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Suharnik 2023, Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran, Surabaya, UWKS Press.
- Tambunan, Tulus 2011, Perekonomian Indonesia: Teori dan Realitas, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tjandra, W. Riawan 2008, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Zainuddin, K. H. 2020, Fiqh Siyasah Kontemporer: Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Ilmiah.

Jurnal :

Astuti, Rini 2021, " *Implementasi Kebijakan Pengangguran di Tingkat Daerah* ", Jurnal Administrasi Publik, vol. 8, no. 2.

Aryati dan Sunaryanto 2015, " *Analisis Pengangguran Terdidik di Provinsi Bengkulu* ", Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, vol. 5, no. 4.

Eviyati dan Titi Darmi 2021, " *Analisis Program Kerja Balai Latihan Kerja untuk Penanggulangan Pengangguran di Bengkulu* ", PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, vol. 1, no. 2.

Jafar, Wahyu Abdul 2018, " *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis* ", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, vol. 3, no. 1.

Mentari, Ellyza Cindi dan Waizul Qarni 2023, " *Peran Pemerintah Melalui Program Pelatihan dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran* ", Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol. 8, no.1.

Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur dan Ahmad Sukandi 2023, " *Review of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on The Implementation of The Village Government* ", Jurnal Hukum Sehasen, vol. 11, no.1.

Khoerunnisa, Tia, Tiani Handayani, Nazwa Alya, Ulfia Haura dan Arif Fadilla 2024, " *Penerapan Program Pelatihan Kerja dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Struktural*", Journal of Economics, Assets, and Evaluation, vol. 2, no. 1.

Suparto 2024, " *Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam*", vol. XIX, no. 1.

Skripsi :

Aji, Arum Restu 2024, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Tanfidziyah,

Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Ednarda, Rizky Agusta 2024, Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Bengkulu, Skripsi.

Maghdalena, Mustika 2018, Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Ramadhani, Rezky Wulan 2022, Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu.

Website :

Badan Pusat Statistik 2024, Data Ketenagakerjaan Indonesia, diakses melalui <https://www.bps.go.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2024, Pengangguran, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Pemerintah Kota Bengkulu 2024, Profil Kota Bengkulu, diakses melalui <https://profil.bengkulukota.go.id>.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu 2024, Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu, diakses melalui <https://disnaker.bengkulukota.go.id>.